

Geliat Perajin Topeng Cepetan

KEBUMEN (KR) - Menjadi perajin topeng cepetan seperti yang dilakoni Waluyo (43), ternyata tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan membuat topeng cepetan, Waluyo ingin seni tari topeng tradisional cepetan yang menjadi khas Kebumen, tetap lestari. Karena itu pula di waktu senggangnya, Waluyo melatih seni tari topeng cepetan pada anaknya. "Biar anak mengenal budaya sejak dini. Agar ikut *nguri-uri*," ujar Waluyo, warga Dukuh Karangjoho, Desa/Kecamatan Karanggayam. Kayu waru, jenitri, albasia, dan kayu pule, biasa dimanfaatkan Waluyo untuk membuat topeng cepetan. Dibantu istri, Waluyo membuat topeng cepetan dengan berbagai karakter, di antaranya karakter buto cakil, buto mringis, buta melet, satria, serta karakter hewan.

Dengan keterampilan dan keuletannya, kayu yang telah dipola, dipahat hingga membentuk karakter yang telah direncanakan. Proses berikutnya, pewarnaan dan disempurnakan dengan memberi rambut berbahan ijuk. Untuk menyelesaikan satu topeng karakter satria, Waluyo memerlukan waktu sekitar 1 hari. Namun untuk karakter buto yang proses pengerjaannya lebih rumit, bisa sampai 7 hari. Harga topeng cepetan buataannya, Rp 200.000 hingga Rp 300.000. Waluyo bersyukur hasil kreasinya masih diminati masyarakat. Bahkan pernah mendapat pesanan untuk dibawa ke Papua. Seni tari topeng cepetan pada awalnya sebagai upaya warga sipil mengusir penjajah dengan cara menakut-nakuti dengan topeng cepetan yang seram. Setelah kemerdekaan, cepetan menjadi kesenian rakyat. Tarianya yang energik melambangkan kegembiraan. (Suk)



KR-Sukmawan

Waluyo melatih seni tari topeng cepetan pada anak.

FKM Unimus Gelar Klinik Manuskrip

SEMARANG (KR) - Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) menggelar Klinik Manuskrip Jurnal di kampus setempat, Senin-Rabu (28-30/12). Dekan FKM Unimus Dr Sayono SKM MKes (epid) didampingi Ketua Panitia Kegiatan Irfanul Hakim SKM PhD.Sc menyampaikan Klinik Manuskrip dilakukan dalam rangka mendukung publikasi ilmiah para dosen. "Publikasi ilmiah memiliki multi fungsi, pertama meningkatkan kredibilitas kepakaran dosen sekaligus untuk eligibilitas kompetisi penelitian tingkat nasional serta internasional. Sekaligus bisa untuk meningkatkan percepatan jabatan fungsional dosen" ujar Dr Sayono. Menurut Sayono, semua itu akan bisa mendukung kredibilitas lembaga Unimus di bidang ilmiah. Dari banyak hal bermuara pada akreditasi Unggul 2025. Klinik juga dilakukan untuk membiasakan dosen menulis. Awalnya peserta dibantu, dipandu, didampingi tiap semester 2 sampai 3 periode. Jika sudah bisa maka melepas dan siap berkompetisi nasional dan internasional.

Kepala Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FKM Didik Sumanto SKM MKes (Epid) menyampaikan FKM mengadakan klinik manuskrip bagi para dosen selama 3 hari. Antusias para peserta luar biasa. "Harapannya kami semua peserta bisa submit di jurnal internasional bereputasi. Salah satu peserta Klinik Manuskrip Diki Bima Prasetyo SKM MPH menyampaikan semua peserta Klinik dibimbing menulis mulai dari judul, abstrak sampai daftar pustaka. Juga dilatih secara teknis dan detail cara membuat akun, memilih jurnal dan lain sebagainya. (Sgi)

Pasar Harian Desa Bandongan Dihidupkan

MAGELANG (KR) - Pasar Desa merupakan instrumen pendayagunaan berbasis kemandirian, yang salah satu fungsinya sebagai sumber pendapatan desa, sekaligus bisa meningkatkan ekonomi dan menumbuhkan gairah industri kecil masyarakat, melalui pengembangan pasar. Hal itu dikemukakan Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Magelang Iwan Sutiarso saat meresmikan Pasar Harian Desa Bandongan Magelang, Minggu (2/1).

Dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Bandongan Sujono menyerahkan surat izin penempatan kios dan los kepada beberapa orang perwakilan pedagang, disaksikan Iwan Sutiarso. Bupati Magelang mendukung serta menyambut baik pembukaan Pasar Harian Desa Bandongan dan berharap Pasar Harian Desa Bandongan bisa bermanfaat dalam upaya mendorong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selaras dengan pembukaan Pasar Harian Desa Bandongan ini, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai subyek pembangunan ekonomi, sekaligus menjadi motor penggerak utama dalam mendorong bergulirnya roda perekonomian, sehingga keputusan dan kebijakan yang diambil, utamanya dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, harus efektif dan tepat sasaran dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Bupati Magelang juga berharap sarana-prasarana serta fasilitas Pasar Harian Desa Bandongan hendaknya senantiasa dirawat dan dijaga bersama agar kondisi pasar tetap layak dipergunakan sebagai pasar harian. (Tha)



KR-Thoha

Kepala Desa Bandongan menyerahkan surat izin penempatan kios dan los kepada beberapa perwakilan pedagang.

DPRD Grobogan Bahas Raperda Retribusi Perizinan Tertentu



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN

GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan mulai membahas Raperda tentang perubahan kelima atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agus Siswanto SSos, Rabu (29/12), mendengarkan penjelasan dari Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM.

Sri Sumarni mengatakan kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan dampak besar terhadap peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat, terdapat kurang lebih 80 Undang-Undang, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut. Di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi muatan dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah, antara lain berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu.

"Sebagaimana kita ketahui, bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karenanya, Peraturan Daerah yang kita miliki harus disesuaikan kembali dengan peraturan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini ditegaskan pula oleh Mendagri melalui Surat Edaran Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 yang isinya antara lain bahwa retribusi Perseutujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing hanya dapat dipungut apabila telah diatur dalam peraturan daerah. Dalam hal peraturan da-

erah mengenai kedua retribusi tersebut belum ditetapkan, namun pemerintah daerah melakukan pemungutan atas kedua retribusi dimaksud, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib diserahkan ke kas negara," jelas Sri Sumarni.

Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bupati mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Dalam Instruksi Mendagri tersebut antara lain disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota untuk tetap

mempedomani dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, dan segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan/ditetapkan," jelas Sri Sumarni.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemkab Grobogan mengajukan Raperda ten-

Perubahan Kelima atas Perda Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Materi muatan dalam Raperda tersebut secara umum berisikan ketentuan yang mengatur mengenai perubahan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Retribusi Perseutujuan Bangunan Gedung, perubahan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, penyesuaian beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Retribusi Izin Trayek. (Tas)



KR-M Taslim

DPRD Grobogan melakukan pembahasan Raperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Tim Appraisal Tetapkan Harga Tanah

SALATIGA (KR) - Tim appraisal yang dikontrak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Salatiga menetapkan harga tanah perumahan 'tukang becak', senilai Rp 450.000-Rp 600.000/M2.

"Harga tanah di Perumahan Sub Inti Kenteng Tegalrejo yang belum selesai sejak tahun 1985

sudah ditetapkan. Tim appraisal menentukan harga Rp 450.000-Rp 600.000/M2 yang harus dibayar penghuni/pemilik," jelas Kepala DPKP Salatiga, Eny Endang Surtiani, Minggu (2/1).

Penetapan harga tim appraisal ini menurut Eny telah dilaporkan kepada Walikota Salatiga untuk langkah selanjutnya.

Kemudian, setelah DPKP mendapatkan persetujuan (ACC) dari Walikota akan diserahkan wewenangnya kepada bagian aset daerah di BPKPD Salatiga.

"Kami menunggu ACC dari Pak Walikota mengenai harga yang ditetapkan oleh tim appraisal tersebut," kata Eny. Diberita-

kan sebelumnya, DPKP melakukan penelusuran aset daerah yang kini digunakan untuk perumahan Sub Inti (rumah becak).

Puluhan kapling tanah belum dibayar sehingga belum bisa masuk kas daerah. Masalah sudah berjalan puluhan tahun tidak pernah selesai dan menjadi temuan BPK. (Sus)

Unimus Latih Masyarakat Produksi Pakan Ternak

SEMARANG (KR) - Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) mendapatkan dana sekitar RP 1,6 miliar untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dengan 13 judul yang didanai oleh Kemendikbud, Dirjen Dikti-ristek Tahun 2021. Salah satu pengabdian masyarakat dilakukan di Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, bulan Desember 2021. Judul yang di-

angkat 'Aplikasi Pakan Fermentasi dan Pemanfaatan Kotoran Menjadi Kompos Pada Kelompok Tani Ternak Kambing Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat'.

Pengabdian masyarakat ini termasuk dalam payung Penelitian Kebijakan MBKM dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian PTS. Pengabdian ini aplikasi hasil pe-

nelitian dosen Unimus terkait pembuatan starter fermentasi pakan ternak dari limbah sayuran kubis dan sawi. "Berdasarkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka Dirjen Dikti-ristek memberikan program bantuan pendanaan pengabdian masyarakat berbasis penelitian. Kegiatan pengabdian berupa penyuluhan dan pendampingan pembuatan pakan ternak fermentasi serta diseminasi alat perajang rumput," ujar Ketua Tim Pengabdian Unimus Dr Dini Cahyandari yang juga dosen Program Studi Teknik mesin Fakultas Teknik Unimus, Rabu (29/12).

Adapun anggota tim terdiri Dra Sri Sinto Dewi MSi Med (Prodi Analisis Kesehatan) dan Alwiyah SE MSi (Prodi Akuntansi) serta melibatkan pula 4 mahasiswa Unimus. (Sgi)



KR-Sugeng Irianto

Tim Pengabdian Unimus bersama peserta pelatihan.

KEPALA KEMENAG SALATIGA KH TAUFUQR ROHMAN AG MSI

Bertekad Pertahankan Capaian Prestasi Predikat WBK

KEPALA Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Salatiga, KH Taufiqur Rahman SAg MSI, bersyukur lantaran kantornya meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Penda-yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Selain patut disyukuri, capaian yang merupakan penghargaan atas kinerja selama ini juga patut dibanggakan setelah melalui kerja keras. Bahkan, semula jajaran yang dipimpinnya tidak percaya bila akhirnya meraih supremasi tersebut.

"Tapi faktanya, penghargaan *prestise* itu telah kami terima pada 20 Desember 2021, sehingga wajar bila kami bersyukur. Apalagi di lingkungan Kemenag Indonesia ada dua yang meraih WBK yakni Kemenag Salatiga dan MAN Insan Cendekia, Serpong. Kami harus mampu mempertahankan apa yang telah diraih, bahkan jika mungkin harus meningkatkannya," tutur Taufiqur Rohman, Sabtu (1/1).

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenag Jateng H Mustafin Ahmad, saat menghadiri tasyakuran di Kemenag Salatiga, pada 27 Desember 2021, menyampaikan predikat WBK yang diraih Kemenag

Salatiga telah membawa harum nama Kanwil Kemenag Provinsi Jateng. Mustafin mengapresiasi tinggi prestasi tersebut sekaligus meminta agar reputasi tersebut dipertahankan di tahun-tahun mendatang.

Taufiqur Rohman, yang juga pengurus Komisi Fatwa MUI Jateng, menegaskan menjadi tugas selanjutnya bagi Kemenag Salatiga untuk menjaga dan mempertahankan predikat WBK di tahun-tahun berikutnya. Karena itulah, dirinya bersama jajaran akan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pria kelahiran Sumenep, Madura, 27 Juni 1972 yang gemar membaca dan berorganisasi ini bercerita, instansi yang dipimpinnya meraih penghargaan pembangunan zona integritas oleh Menpan-RB, diberikan secara daring, melalui proses panjang yang diawali dengan submit penilaian mandiri pembangunan zona integritas sejak Desember 2020. Diceritakan, ada enam area pengungkit yang harus dipenuhi, di antaranya penerapan manajemen perubahan, tata laksana, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Muaranya harus meng-



KR-Isdiyanto

KH Taufiqur Rohman Ag Msi

hasilkan dua hasil yaitu, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

"Selanjutnya kami mulai membangun komitmen menyeluruh mulai unsur pimpinan hingga semua jajaran termasuk sopir, cleaning servis dan pramu bakti. Hasilnya kami memastikan Kemenag Kota Salatiga bersih dari korupsi, setelah memastikan pengawasan masyarakat dan nomor pengaduan melalui medsos Keme-

nag Salatiga termasuk menerapkan Wishe Blowing System. Potensi KKN kami petakan dan kami cegah dengan membuat pola kerja yang transparan," ujar Taufiqur Rohman.

Begitu pula, yang pernah mengikuti kursus kilat tentang leadership dan management di Universitas La Trobe Melbourne, Australia ini, reformasi birokrasi tidak luput dari garapannya. Misalnya, dalam hal penempatan pegawai sudah menggunakan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Taufiqur Rohman menyampaikan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat melalui penyederhanaan birokrasi dengan SOP yang cepat dan tetap mengacu pada regulasi. Hal tersebut untuk menunjang penyederhanaan birokrasi dan kecepatan pelayanan, dibuatlah aplikasi yang bisa menampung pelayanan langsung kepada masyarakat cukup dengan membuka google yaitu aplikasi "SIMSALABIM" (Sistem Informasi Manajemen Salatiga Bersih Inovatif dan Melayani), termasuk membuat inovasi-inovasi layanan yang berdampak langsung pada masyarakat. (Isdiyanto)